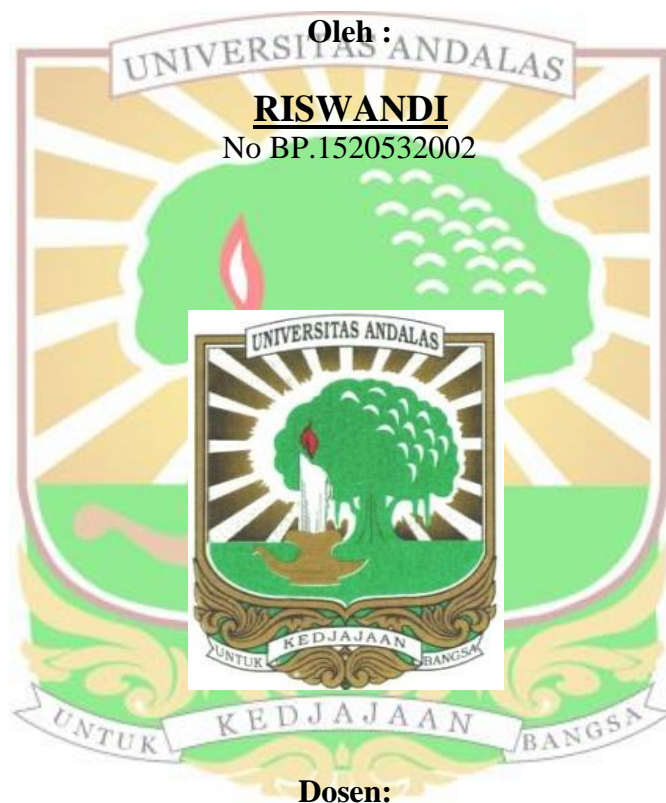


**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016**

T E S I S



Pembimbing 1 : Dr. Hefrizal Handra. M.Soc. Sc
Pembimbing 2 : Drs. Masrizal, M.Soc. Sc

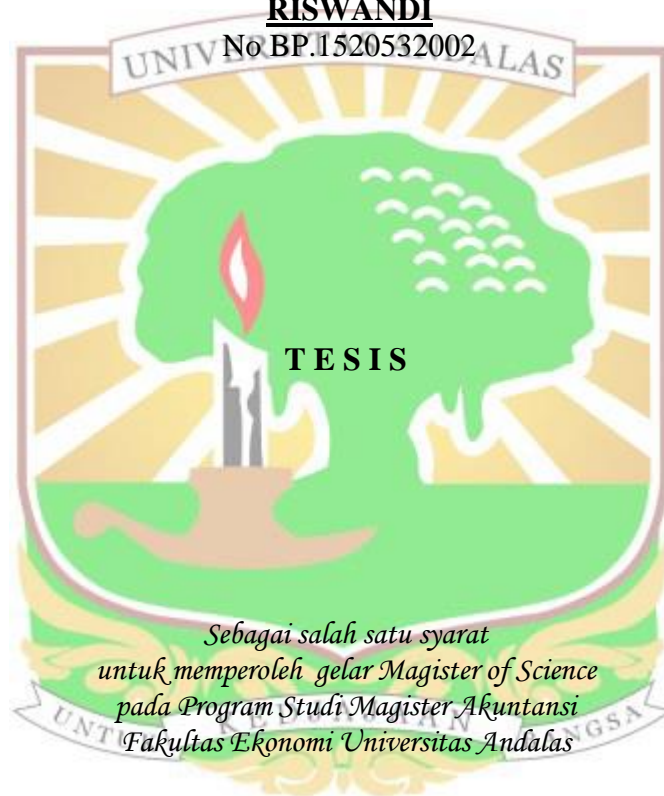
**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016**

Oleh :

RISWANDI

No BP.1520532002



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016

Oleh

Riswandi

Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme penyusunan, kesesuaian dan kendala-kendala yang ditemui dalam perencanaan dan penganggaran desa secara praktik di Pemerintahan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue tahun 2016 dibandingkan dengan regulasi. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* diambil 3 (tiga) desa yaitu Desa Sua-Sua status desa berkembang, Desa Lasikin status desa tertinggal dan Desa Nancawa status desa sangat tertinggal, Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh dari studi dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyusunan dan penganggaran desa untuk Desa Sua-Sua, Lasikin dan Nancawa secara praktik belum sepenuhnya melaksanakan tahapan mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran desa sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan konsistensi program dan kegiatan RPJMDesa Vs RKPDesa Vs APBDesa. Desa Sua-Sua dari 41 kegiatan, terdapat 25 (60,98%) kegiatan tidak konsisten dan 16 (39,02%) kegiatan konsisten. Desa Lasikin dari 36 kegiatan, terdapat 30 (83,33%) kegiatan tidak konsisten dan 6 (16,67%) kegiatan konsisten. Desa Nancawa dari 39 kegiatan, terdapat 33 (84,62%) kegiatan tidak konsisten dan 6 (15,38%) kegiatan konsisten. Kesesuaian indikator perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan tahapan sebagai berikut: Tahapan RPJMDesa dari 7 tahapan yang harus dilaksanakan, hanya 6 (85,71%) yang dilaksanakan dan 1 (14,29%) tidak dilaksanakan. Tahapan RKPDesa, dari 9 tahapan yang harus dilaksanakan, untuk Desa Sua-Sua dan Desa Lasikin hanya 4 (44,44%) dilaksanakan dan 5 (55,56%) tidak dilaksanakan, sedangkan untuk Desa Nancawa telah melaksanakan 5 (55,56%) dan 4 (44,44%) tidak dilaksanakan. Tahapan APBDesa untuk Desa Sua-Sua, Lasikin dan Nancawa yang menjadi subjek penelitian, kedua tahapan penganggaran dilaksanakan. Kendala-kendala dalam perencanaan dan penganggaran desa antara lain: belum adanya Peraturan Bupati Simeulue tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, terlambatnya penyusunan Peraturan Bupati Simeulue nomor 12 tahun 2016, masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta keterlambatan penyampaian pagu indikatif oleh pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pemerintah desa sebagai pedoman dalam penyusunan RKPDesa tahun 2016, dimana RKPDesa juga sebagai pedoman penyusunan APBDesa.

Kata kunci : Analisis, Perencanaan, Penganggaran, Desa

ABSTRACT

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016

By

Riswandi

The purpose of this study is to analyze how the mechanisms of preparation, suitability and constraints that encountered in planning and budgeting village as practically in Government Teupah Tengah Sub District in the District of Simeulue year 2016 compared with regulation. Research subjects using purposive sampling technique taken 3 (three) villages namely Sua-Sua Village with status developing village, Lasikin Village with status lagging village and Nancawa Village with status is very lagging. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Data that used in the form of primary data from observation result and interview, secondary data obtained from study documentation of planning and budgeting of related village.

The results showed that the mechanism of preparation and budgeting village in this case is village Sua-Sua, Lasikin and Nancawa, in practice has not fully carry out the stages of the mechanisms of planning and budgeting village in accordance with Ministry of Home Affairs Regulation number 114 year 2014 about Guidelines for Rural Development and Ministry of Home Affairs Regulation number 113 of 2014 about Financial Management Village. Suitability planning and budgeting village based on the consistency of programs and activities Medium Term Development Plan (RPJMDesa) Vs Government Work Plan (RKPDesa) Vs Local Government Budget (APBDesa). Sua-Sua Village from 41 activities, there were 25 (60,98%) inconsistent activities and 16 (39,02%) consistent activities. Lasikin Village from 36 activities, there were 30 (83,33%) inconsistent activities and 6 (16,67%) of the consistent activities. Nancawa Village from 39 activities, there were 33 (84,62%) inconsistent activities and 6 (15,38%) consistent activities. Suitability indicator planning and budgeting village based on following stages: Stage Medium Term Development Plan (RPJMDesa) from 7 steps that must be implemented, only 6 (85,71%) that were implemented and 1 (14,29%) were not implemented. Stages Government Work Plan (RKPDesa), from 9 steps that must be implemented for Sua-Sua Village and Lasikin Village only 4 (44,44%) is implemented and 5 (55,56%) is not implemented, while for the Nancawa Village has conducted 5 (55,56%) and 4 (44,44%) not implemented. Stages of Local Government Budget (APBDesa) for Sua-Sua, Lasikin and Nancawa Villages that are the subject of research, both stages of budgeting are implemented. Constraints in the planning and budgeting of the village, among others: there are no existence of Government Regulation Simeulue Regent of the technical manual drafting RPJMDesa and RKPDesa, the late of preparation Regulation number 12 year 2016, lack of coordination between village government and the Government of Simeulue District, and also the delay in submission of the indicative ceiling by District Government of Simeulue to Village Government as guidance in the preparation of RKPDesa year 2016, where RKPDesa as well as guidelines for the preparation APBDesa.

Keywords: Analysis, Planning, Budgeting, Village.